

Hubungan Antara Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Takalar

Muhammad Rusydi

Universitas Muhammadiyah Makassar

Abstract

The purpose of this research is to know the relation of fund balance with the amount of public expenditure (development budget) in Takalar Regency and to know the amount of balancing fund at Budget of Revenue and Expenditure in Takalar Regency. The required data is obtained by collecting secondary data, ie data sourced from the Regional Development Planning Agency of Takalar Regency, the Financial and Asset Management Agency of Takalar Regency, the Central Bureau of Statistics of Takalar Regency. The data obtained then analyzed using multiple regression.

The result of the research concludes that there is a positive and significant influence between the amount of balancing fund and the development expenditure. The correlation level is shown by the R value of 0.956, which means that there is a very strong relationship while the model's predictive power is shown by the R Square value of 0.913 which means 91.3% of the rise and fall of development expenditure caused by the temporary balance of 8.7% due to other variables not researched.

Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia menurut UU No. 32 Tahun 2004 didasarkan atas tiga azas pokok yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Azas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Memperhatikan kedudukan daerah kabupaten sebagai daerah paling depan dalam berbagai kegiatan, maka titik berat otonomi diletakkan pada daerah kabupaten tersebut, bukan pada daerah provinsi. Kewenangan daerah kabupaten menyangkut pelaksanaan asas desentralisasi ini adalah kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain seperti kebijakan tentang perencanaan nasional, pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian, pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia, pendayagunaan sumberdaya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi, dan standardisasi nasional.

UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah dewasa ini, peran daerah semakin strategis dalam rangka mempercepat akselerasi pembangunannya. Otonomi daerah diharapkan dapat mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Namun demikian, sebagian besar dari kegiatan-kegiatan pemerintah pusat ini, dilakukan di daerah-daerah, kecuali masalah-masalah luar negeri. Dalam kegiatan demikian ini, pendelegasian wewenang tidak diberikan pemerintah daerah tetapi sebaliknya, kepada

instansi-instansi pemerintah daerah. Pemerintah hanya mengkoordinir seluruh kegiatan ini. Asas dekonsentrasi mengandung pengertian bahwa pemerintah daerah harus mengikuti kebijaksanaan pemerintah pusat dan tidak mempunyai kebijaksanaan tersendiri.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan penulis, tampak bahwa peran dana perimbangan sangat dominan dalam struktur APBD Kabupaten Takalar. Hal ini dapat terlihat dari rendahnya proporsi penerimaan PAD dibandingkan dengan total penerimaan Kabupaten Takalar yang bersumber dari pemerintah pusat. Jika dilihat dari aspek pembelanjaan modal, lebih dari separuh dibiayai dari dana perimbangan. Hal ini jelas mencerminkan tingginya ketergantungan daerah terhadap anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat.

Penerimaan Daerah

Pembangunan ekonomi di definisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan GNP perkapita (*Gross National Product*) atau pendapatan masyarakat meningkat dalam periode waktu yang panjang. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi memiliki tiga sifat penting yaitu : suatu proses yang berarti terjadinya perubahan terus-menerus, adanya usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat.

Todaro (2007) mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan kepada perubahan besar baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

Berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah telah menggeser sumber-sumber penerimaan dan manajemen pengelolaan dana yang berfokus pada pemerintah kabupaten. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan.

Penerimaan daerah adalah komponen anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditujukan untuk membiayai pembangunan dan melancarkan roda pemerintahan, karena itu tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar pendapatan daerah dapat selalu mengalami peningkatan dalam setiap periode sehingga tersedia cukup dana untuk melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pendapatan Daerah

Seperti telah diuraikan di muka, bahwa untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan di daerah diperlukan sejumlah dana yang salah satu di antaranya melalui pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan utama di samping dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (Penjelasan Pasal 3).

Dari pengertian di atas, bisa dipahami bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah diperlukan upaya yang maksimal dalam menggali potensi daerah untuk dijadikan sebagai sumber penerimaan dan kemudian diatur dalam suatu peraturan daerah yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Selanjutnya dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dikemukakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan;
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pembiayaan Daerah

Di masa yang lalu, pembiayaan pembangunan didanai dari tabungan pemerintah yang merupakan kelebihan penerimaan dalam negeri dari pengeluaran rutin. Dalam era otonomi, pembiayaan di daerah terdiri dari pembiayaan yang berasal dari anggaran dekonsentrasi, anggaran tugas pembantuan, dana alokasi khusus dan dana alokasi umum.

Anggaran dekonsentrasi adalah pelaksanaan APBN di daerah Propinsi, yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan dekonsentrasi. Kemudian anggaran tugas pembantuan adalah pelaksanaan APBN di daerah dan Desa, yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan tugas pembantuan.

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi. Sedang dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 19).

Menurut Yunianto (2007 : 3) pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 10 bahwa komponen dana perimbangan dapat berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Selanjutnya pasal 11 menyatakan dana bagi hasil adalah bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Pajak yang dimaksud terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan Pasal 25, dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Sementara dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak dan gas bumi, serta pertambangan panas bumi.

Metode Penelitian

Data yang dibutuhkan diperoleh dengan mengumpulkan data sekunder, yaitu data yang bersumber dari instansi terkait, yaitu :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar.
2. Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Takalar.
3. Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar.

Pengumpulan data yang terdiri dari :

- a. Data belanja daerah
- b. Data belanja pembangunan, dan
- c. Data APBD Kabupaten Takalar
- d. Teori-teori yang terkait dengan masalah yang diteliti

Untuk menjawab masalah penelitian, maka data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan metode sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan hipotesis pertama, digunakan analisis deskriptif kualitatif dalam bentuk tabulasi dan persentase serta rata-rata untuk memperoleh gambaran serta perbandingan mengenai besarnya penerimaan dana perimbangan dengan belanja publik (anggaran pembangunan) di Kabupaten Takalar.
2. Untuk membuktikan hipotesis kedua terlebih dahulu digunakan analisis statistik inferensial berupa analisis regresi linear sederhana dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y = a + bx \dots\dots\dots (\text{Hasan, M. Iqbal, 2008 : 218})$$

Dimana:

Y = belanja publik (anggaran pembangunan)

X = dana perimbangan

a = konstanta

b = koefisien regresi

Hasil Penelitian

1. Belanja Daerah

Belanja daerah Kabupaten Takalar kurung waktu 2004-2008 dapat dilihat dari besaran pengeluaran seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Belanja Aparatur Daerah di Kabupaten Takalar

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2004	66.147.445.748	62.749.082.997	94,86
2005	69.231.137.675	64.357.517.022	92,96
2006	101.605.102.215	91.557.005.269	90,11
2007	306.902.589.470	256.577.989.109	83,60
2008	336.403.036.895	320.189.397.889	95,18

Sumber : DPKD Kabupaten Takalar, 2010

Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa anggaran belanja aparatur meningkat dengan cukup tajam sejak tahun 2004 hingga tahun 2008. Demikian halnya dengan realiasi anggaran

untuk belanja aparatur daerah juga ikut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, walaupun jika diperhatikan persentase realisasi anggaran cenderung berfluktuasi.

Pada tahun 2004, jumlah anggaran belanja aparatur daerah sebesar Rp. 66.147.445.748 sedang realisasinya hanya sebesar Rp. 62.749.082.997 atau sekitar 94,86%. Tahun berikutnya, yaitu tahun 2005 jumlah anggaran naik menjadi Rp. 69.231.137.675 dengan realisasi mencapai Rp. 64.357.517.022 yang berarti hanya bisa tercapai 92,96% dari rencana anggaran. Demikian seterusnya ada kenaikan yang cukup tajam pada tahun 2006 sampai tahun 2008. Pada tahun 2008 jumlah anggaran belanja aparatur sudah meningkat empat kali lipat dibandingkan dengan tahun 2004. Hal ini disebabkan adanya perubahan struktur anggaran, yaitu pada tahun 2004 sampai 2006, format APBD untuk pos belanja aparatur daerah meliputi belanja administrasi umum, belanja operasi, dan belanja modal sedangkan mulai tahun 2007 pos belanja berubah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer. Konsekuensi dari perubahan ini adalah disatukannya seluruh anggaran untuk operasional seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja bantuan keuangan kepada instansi vertikal dalam negeri. Sedangkan untuk belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap dan aset lainnya.

Tabel 2 Belanja Modal di Kabupaten Takalar

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2004	112.642.341.202	108.490.383.427	96,31
2005	130.545.506.066	123.667.259.343	94,73
2006	235.471.091.026	188.688.459.206	80,13
2007	212.335.329.650	178.365.795.606	84,00
2008	234.777.258.900	218.982.464.369	93,27

Sumber : DPKD Kabupaten Takalar, 2010

Apabila diamati, maka secara keseluruhan jumlah dana yang dikeluarkan untuk biaya pembangunan di Kabupaten Takalar sejak tahun anggaran 2004 hingga 2008 memang cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada dua tahun terakhir (2007 – 2008). Jumlah belanja modal pada tahun 2004 yang sebesar Rp. 108.490.383.427 dengan jumlah belanja modal pada tahun 2008 yang berjumlah Rp. 218.982.464.369 yang berarti telah terjadi peningkatan belanja modal sebesar Rp. 110.492.080.942 atau naik sekitar 101,85 persen. Hal ini menandakan bahwa dalam era otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Takalar terus melakukan upaya yang signifikan bagi pembangunan di berbagai sektor.

Selanjutnya, pada tabel 4.2 juga ditunjukkan bahwa dilihat dari besarnya dana yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Takalar untuk belanja modal, tidak semua yang dapat terealisasi. Bahkan, jika diperhatikan maka cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh karena turunnya realisasi penerimaan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, maupun pendapatan lain-lain.

Realisasi Dana Perimbangan

Dana perimbangan meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan. Keempat pos penerimaan ini ditengarai mendominasi total penerimaan pemerintah Kabupaten Takalar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Penerimaan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2004 – 2008.

POS PENERIMAAN DAERAH	2004	2005	2006	2007	2008
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.225.246.361	6.491.318.369	8.973.944.286	11.046.201.644	13.213.550.122
Pajak Daerah	655.268.350	946.299.827	1.260.236.048	1.444.370.233	1.666.352.041
Retribusi Daerah	2.371.538.548	2.882.036.929	2.662.651.046	2.440.754.097	4.079.369.870
Bagian Laba Usaha Daerah	762.400.586	1.331.031.917	1.976.361.633	2.678.777.718	3.460.437.687
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	1.436.039.376	1.331.949.696	3.074.695.559	4.482.299.596	4.006.390.524
PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN	169.654.651.736	194.210.129.922	292.359.756.378	352.336.067.594	396.947.093.778
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	15.626.647.844	19.176.192.280	19.204.426.905	27.344.279.258	22.377.335.342
Dana Alokasi Umum	138.354.000.000	149.194.000.000	237.750.000.000	264.008.000.000	294.665.014.000
Dana Alokasi Khusus	13.240.000.000	13.340.000.000	28.420.000.000	44.979.000.000	56.319.000.000
Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan	2.434.000.941	2.509.937.642	6.985.329.473	15.534.788.326	23.085.743.936
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	574.901.898.096	668.528.448.291	916.303.700.664	11.401.537.241.238	13.610.497.145.900
RA.SIO PAD TERD TOTAL PENDAPATAN	2,37%	3,48%	2,37%	3,84%	3,22%
RA.SIO DANA PERIMBANGAN	37,41%	36,60%	37,82%	36,36%	36,78%

Sumber : DPKAD Kabupaten Takalar, diolah 2010

Bila diperhatikan data yang ditunjukkan pada tabel 3 tersebut, dapat diketahui besarnya ketergantungan pemerintah Kabupaten Takalar terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Praktis kemampuan daerah untuk membiayai pembangunannya sendiri hanya berkisar 3% per tahun sedangkan dana perimbangan dalam bentuk bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bantuan transfer dari pemerintah pusat kisarannya mencapai 97% dari total APBD Kabupaten Takalar.

Kondisi ini tentu saja memberi makna bahwa terjadi kesenjangan luar biasa antara kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dana dengan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan. Sehingga sangat mengkhawatirkan jika otonomi daerah semata-mata dimaknai sebagai bentuk pelimpahan kewenangan termasuk daerah harus membiayai hidupnya sendiri. Jika diperhatikan, komposisi penerimaan terbesar memang dari dana alokasi umum yang persentasenya berkisar antara 74,23% sampai 81,55% dari total dana perimbangan yang diterima pemerintah Kabupaten Takalar sementara jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah DAU menyumbang sebesar 71,84% sampai 79,11%. Peran Dana Alokasi Umum dengan demikian sangat vital karena dari DAU inilah pemerintah daerah membiayai belanja pegawainya.

Pergerakan positif yang dimaksud adalah bahwa sumber penerimaan PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Grafik tersebut memberikan gambaran bahwa penyumbang terbesar penerimaan PAD Kabupaten Takalar adalah retribusi daerah kemudian disusul oleh lain-lain pendapatan asli daerah, disusul penerimaan dari bagian laba usaha daerah, dan yang terakhir adalah pajak daerah. Sementara itu pergeseran terlihat dari kecenderungan berubahnya kontribusi masing-masing pos penerimaan seperti adanya pergerakan penerimaan yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang menggeser dominasi penerimaan retribusi daerah sejak tahun 2006 hingga tahun 2008. Sedangkan penerimaan dari bagian laba usaha daerah dan pajak daerah terus mengalami pergerakan positif. Hal ini tentu saja menggemberikan karena dapat diartikan bahwa pemerintah Kabupaten Takalar berupaya maksimal untuk memaksimalkan penerimaan daerahnya melalui pos Pendapatan Asli Daerah.

Perbandingan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal

Perbandingan antara alokasi dana perimbangan dengan belanja publik di Kabupaten Takalar menjadi penting untuk diperhatikan, mengingat hal ini akan memberikan gambaran sejauhmana keterkaitan antara besarnya belanja daerah yang tujuannya untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi sebagai sasaran sentral dengan angka pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai pada tahun bersangkutan.

Untuk melihat perbandingan antara alokasi belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar, maka berikut ini penulis akan menguraikan data-data berdasarkan hasil penelitian dan pencatatan data sekunder pada kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir.

Tabel 4 Perbandingan Belanja Daerah Dengan Dana Perimbangan

Tahun	Dana Perimbangan	Belanja Modal	Persentase
2004	169.654.651.785	108.490.383.427	63,95
2005	184.210.129.922	123.667.259.343	67,13
2006	292.359.756.378	188.688.459.206	64,54
2007	352.336.067.584	178.365.795.606	50,62
2008	396.947.093.778	218.982.464.369	55,17

Sumber : Tabel 4.2 dan 4.3, diolah 2010

Tabel tersebut menunjukkan bahwa perubahan belanja modal (belanja pembangunan) memiliki hubungan dengan naik turunnya penerimaan dana perimbangan, artinya secara kualitatif dapat dikatakan bahwa setiap terjadi perubahan alokasi anggaran dana perimbangan pada tahun tertentu akan diikuti pula oleh berubahnya anggaran pembangunan.

Hal tersebut terlihat dari angka-angka yang ditunjukkan pada tabel 4.4 tersebut di atas, yaitu pada tahun anggaran 2005 sampai tahun 2006 terjadi peningkatan alokasi anggaran belanja pembangunan yaitu Rp. 108.490.383.427 di tahun 2004 naik menjadi Rp. 123.667.259.343 pada tahun 2005, dan pada tahun 2006 naik lagi menjadi Rp. 188.688.459.206. Sementara pada tahun 2007 terjadi penurunan anggaran pembangunan menjadi Rp. 178.365.795.606, untuk selanjutnya pada tahun 2008 kembali naik cukup tinggi yaitu menjadi Rp. 218.982.464.369. Menurunnya anggaran pembangunan pada tahun 2007 boleh jadi diakibatkan oleh karena pada tahun tersebut Kabupaten Takalar dilaksanakan pemilihan umum kepala daerah untuk memilih bupati dan wakil bupati sehingga konsentrasi anggaran lebih banyak pada kegiatan penciptaan kondisi yang kondusif bagi terselenggaranya pemilihan umum kepala daerah yang aman dan damai.

Sementara itu, untuk penerimaan dana perimbangan terlihat adanya pergerakan positif dan meningkat dari tahun ke tahun sehingga pada tahun 2007 jumlah penerimaan dana perimbangan sudah mencapai dua kali lipat dibanding penerimaan tahun 2004. Jika pada tahun 2004 jumlah penerimaan dana perimbangan baru sebesar Rp. 169.654.651.785 maka pada tahun 2007 jumlahnya sudah mencapai Rp. 352.336.067.584 dan pada tahun 2008 naik lagi menjadi Rp. 396.947.093.778. Hal ini tentu saja menggembirakan jika dilihat dari sisi besarnya dana yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Takalar, menunjukkan pula tingginya kepedulian pemerintah pusat untuk penyediaan anggaran pembangunan. Namun di lain sisi, hal ini tentu kurang baik jika dilihat dari sudut pandang kemandirian daerah. Artinya, Semakin meningkat jumlah dana perimbangan yang diperoleh daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah bersangkutan terhadap pemerintah pusat.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Pembangunan

Untuk memudahkan perhitungan, data yang digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dana perimbangan terhadap belanja pembangunan di Kabupaten Takalar adalah data pada tabel 4.4. dengan klasifikasi dana perimbangan adalah variabel bebas (X) sedangkan belanja pembangunan adalah variabel terikat (Y). Angka-angka yang digunakan untuk analisis juga disederhanakan dengan menghilangkan 9 digit angka sehingga data yang diolah berbentuk sebagai berikut.

Hasil pengolahan data menggunakan program SPSS for Windows Versi 15.0 adalah sebagai berikut:

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	40,970	22,902		1,789	,172
	Dana Perimbangan	,440	,078	,956	5,627	,011

a. Dependent Variable: Blj Pembangunan

Output SPSS tersebut menunjukkan nilai koefisien analisis regresi yang menghasilkan persamaan garis regresi sebagai berikut:

$$Y = 40,970 + 0,440 X$$

Hal ini dapat dijelaskan bahwa ada hubungan yang searah (positif) antara besarnya dana perimbangan yang diterima pemerintah Kabupaten Takalar dengan besarnya belanja pembangunan dengan asumsi faktor lainnya konstan. Angka 40,970 mengandung makna bahwa jika tidak ada dana perimbangan maka kemampuan pemerintah Kabupaten Takalar membiayai pembangunan hanya Rp. 40,97 juta sedangkan angka 0,440 X mengandung arti bahwa jika ada kenaikan dana perimbangan sebesar satu juta maka diperkirakan besarnya belanja pembangunan juga akan naik sebesar Rp. 0,44 juta dengan asumsi faktor lainnya konstan.

Selanjutnya, uji ANOVA (analysis of variance) memperoleh hasil sebagai berikut.

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7806,574	1	7806,574	31,668	,011 ^a
	Residual	739,540	3	246,513		
	Total	8546,114	4			

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan

b. Dependent Variable: Blj Pembangunan

Uji ANOVA menggambarkan ada tidaknya pengaruh nyata variabel X (dana perimbangan) terhadap variabel Y (belanja pembangunan). Kriteria pengujian menggunakan perbandingan antara nilai probabilitas (Sig.) dengan $\alpha = 0.05$. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ maka ada pengaruh yang signifikan pada taraf kepercayaan 95% atau pada tingkat kesalahan 5%. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai probabilitas (Sig.)

sebesar 0,011 yang berarti jauh lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara dana perimbangan dengan belanja pembangunan.

Selanjutnya dilihat pula tingkat korelasi atau keeratan hubungan antara variabel X terhadap variabel Y, demikian pula dengan tingkat determinasinya atau daya ramalnya. Output pengolahan data ditunjukkan berikut ini.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,956 ^a	,913	,885	15,70075

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan

Tingkat korelasi (keeratan hubungan) antara variabel dana perimbangan dengan belanja pembangunan ditunjukkan oleh nilai R. Nilai R sebesar 0,956 dapat diartikan bahwa hubungan antara variabel X (dana perimbangan) dengan variabel Y (belanja pembangunan) sangat kuat karena nilainya mendekati 1. Sementara tingkat determinasi atau daya ramal model ditunjukkan oleh nilai R Square. Nilai R Square adalah sebesar 0,913 yang berarti model dapat memprediksi 91,3 % perubahan Y (belanja pembangunan) artinya sebesar 91,3% variasi naik turunnya belanja pembangunan dapat ditentukan oleh dana perimbangan sedangkan sisanya sebesar 8,7% disebabkan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model analisis.

Kesimpulan

1. Realisasi Belanja pembangunan di Kabupaten Takalar secara persentase cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun anggaran 2004 tingkat realisasi mencapai 96,31% kemudian turun menjadi 94,73% pada tahun 2005, selanjutnya pada tahun 2006 turun lagi menjadi 80,13%. Pada tahun 2007 terjadi kenaikan persentase realisasi belanja modal (anggaran pembangunan) menjadi 84% dan pada tahun 2008 naik lagi menjadi 93,27%. Namun demikian, dilihat dari nilai nominal, terjadi kenaikan realisasi dari tahun ke tahun.
2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara besarnya dana perimbangan dengan belanja pembangunan. Tingkat korelasinya ditunjukkan oleh nilai R sebesar 0,956 yang berarti ada hubungan yang sangat kuat sementara daya ramal model ditunjukkan oleh nilai R Square sebesar 0,913 yang berarti sebesar 91,3% naik turunnya belanja pembangunan disebabkan oleh dana perimbangan sementara 8,7% disebabkan variabel lain yang tidak diteliti.

Rekomendasi

1. Pemerintah Kabupaten Takalar diharapkan terus menggali potensi penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah tanpa harus membebani masyarakat dengan macam-macam pungutan dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Optimalisasi penerimaan daerah dapat ditempuh dengan memaksimalkan peran badan usaha milik daerah agar dapat memberi kontribusi bagi penerimaan daerah.
2. Perlu pula dilakukan usaha untuk menggali sumber-sumber kegiatan ekonomi yang dapat menunjang tumbuh dan berkembangnya sektor ekonomi lokal yang memiliki daya saing tinggi dengan melakukan kajian lebih jauh tentang sektor-sektor unggulan daerah.

Referensi

- Abidin, Said Z. 2004. **Kebijakan Publik**, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.
- Amien, Mappadjantji A. 1999. **Kemandirian Lokal dan Pembangunan Daerah**. Makalah. FE-Unhas.
- _____. 2000. **Pembangunan Daerah dari Perspektif Kemandirian Lokal**. Jurnal Analisis Tahun 1 Nomor 3 Oktober 2000.
- Anonim. 2008. **Kumpulan Undang-Undang**. Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Sipil (YAPPIKA), Jakarta.
- Anonim. 2008. **Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Daerah**. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.
- Hasan, M. Iqbal. **Statistik 2 (Statistik Inferensial)**. Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
- Irawan dan Suparmoko, M. 1981. **Ekonomi Pembangunan**. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Jhingan, M.L. 1988. **Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan**. Penerbit CV. Rajawali, Jakarta.
- Mubyarto. 1988. **Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia**. Penerbit LP3ES, Jakarta.
- _____. 1999. **Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan**, Aditya Media, Jakarta.
- Sukirno, S. 1981. **Pengantar Teori Makro Ekonomi**. Penerbit Bina Grafika, Jakarta.
- _____. 1981. **Ekonomi Pembangunan; Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan**. Penerbit Borta Gorat, Medan.
- Swasono. 1985. **Sistem Ekopomi dan Demokrasi Ekonomi**. Penerbit UI Press, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2004. **Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia**, LAN, Jakarta.
- Todaro, M.P. 1995. **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.